Kebebasan Ekonomi dan Lingkungan di Indonesia

Hari, Tanggal	Kamis, 5 Desember 2024
Tempat	Zoom The Indonesian Institute
Waktu	14.00 – 16.00 WIB
Pembicara	1. Putu Rusta Adijaya, Peneliti Bidang Ekonomi, The Indonesian Institute 2. Dr. Ninasapti Triaswati, Ekonom, Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia 3. Dr. Ruddy Gobel (Senior Policy Adviser, The Centre for Policy Development)

Ringkasan

Pada hari Kamis, 5 Desember 2024, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research melaksanakan kegiatan diskusi Initiative! yang berjudul "Kebebasan Ekonomi dan Lingkungan di Indonesia". Kegiatan diskusi ini merupakan bagian dari diseminasi Indonesia 2024 di bidang ekonomi. Pembicara pada diskusi ini yaitu Putu Rusta Adijaya, Peneliti Bidang Ekonomi, The Indonesian Institute; Dr. Ninasapti Triaswati, Ekonom, Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia; serta Dr. Ruddy Gobel Senior Policy Adviser, The Centre for Policy Development.

Pembicara pertama yakni Putu Rusta Adijaya memaparkan temuannya dalam kajian Kebebasan Ekonomi dan Lingkungan di Indonesia. Putu mengatakan bahwa indeks kebebasan ekonomi di Indonesia terlihat menurun sejak tahun 2020, di mana skor tahun 2021 adalah 66,9, tahun 2022 dengan skor 64,4, dan tahun 2023-2024 dengan skor sama, yaitu 63,5. Pada indeks kebebasan ekonomi di tahun 2024, Indonesia berada pada peringkat 10 dari 39 negara di kawasan Asia-Pasifik dan peringkat ke-53 dari 184 negara di dunia dengan peringkat cukup bebas di mana korupsi masih menjadi hambatan serius.

Di Indonesia, pilar supremasi hukum yang terdiri dari sub-komponen hak milik, integritas pemerintah, dan efektivitas peradilan masih sangat kurang baik. Adanya penurunan dari sub-komponen hak milik dapat terlihat dari masih terdapat konflik agraria yang menyebabkan kerugian ekonomi hingga menimbulkan tindak kekerasan oleh pemerintah terhadap masyarakat adat dan warga lokal. Pada pilar ukuran pemerintah, Indonesia masih memiliki nilai cukup baik. Pilar ketiga, yaitu efisiensi regulasi juga menunjukkan nilai yang baik di atas rata-rata dunia pada tahun 2024. Kebebasan berbisnis memperlihatkan perbaikan yang cukup signifikan selama 2019-2024. Pilar keempat, yaitu keterbukaan pasar pada sub-komponen kebebasan perdagangan dan kebebasan finansial memiliki nilai lebih tinggi dari rata-rata dunia.

Terkait dengan analisis ekonometrika, keseluruhan variabel memiliki tanda signifikan dalam jangka panjang. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap jejak ekologis, konsumsi energi per kapita juga positif signifikan meningkatkan jejak ekologis, low carbon energy from renewable source memiliki nilai negatif signifikan bagi jejak ekologis, dan integritas pemerintah ternyata positif signifikan meningkatkan jejak ekologis. Hubungan antara integritas pemerintah dengan jejak ekologis pun sangat kompleks.

Putu mengajukan dua rekomendasi yakni pertama, pemerintahan Presiden Prabowo harus memperbaiki supremasi hukum termasuk dalam kebijakan hak milik, efektivitas peradilan, dan integritas pemerintah, termasuk perbaikan tata kelola di dalam pemerintahannya melalui perbaikan kualitas lembaga ke arah lembaga inklusif yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Kedua, pemerintahan Presiden Prabowo perlu menyeimbangkan

integritas pemerintah dengan fokus ke arah pembangunan ekonomi yang berasaskan keberlanjutan, baik melalui pengembangan ekonomi hijau maupun ekonomi biru seperti yang tertuang dalam Asta Cita.

Pembicara selanjutnya, Ninasapti menanggapi kajian yang dilakukan oleh Putu dalam Indonesia 2024. Ninasapti menunjukkan bahwa temuan penelitian masih pada tingkat makro dan perlu diperiksa pada tingkat mikro untuk memahami dampak spesifik pada berbagai daerah. Selain itu, Nina juga membahas hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kerusakan lingkungan. Nina menyoroti kontradiksi antara undang-undang pro-investasi dan perlindungan lingkungan. Beliau menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan kebutuhan pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dan lingkungan mereka. Ninasapti juga menunjukkan isu ketidaksetaraan pendapatan dan penurunan kelas menengah di Indonesia.

Setelah Ninasapti, pembicara selanjutnya yakni Ruddy Gobel yang membahas dampak keputusan kebijakan terhadap ekonomi dan lingkungan Indonesia. Ruddy menyoroti konsekuensi dari kemandirian pemerintah dalam produksi beras, yang menyebabkan ketergantungan pada beras dan berkontribusi terhadap kemiskinan. Ruddy juga mengkritik kebijakan subsidi energi, yang menyatakan bahwa mereka memegang sebagian besar anggaran nasional dan menghambat transisi ke energi terbarukan. Ruddy menyarankan agar kebijakan tersebut harus direformasi untuk mempromosikan kebebasan ekonomi dan keberlanjutan. Ruddy juga menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak produksi energi dan pengembangan pada masyarakat dan lingkungan. Ruddy menyimpulkan dengan menyarankan bahwa pemerintah harus mengadopsi pendekatan keamanan energi, memastikan kecukupan, kerelatifan, dan keberlanjutan kebutuhan energi untuk setiap wilayah.

Ruddy menekankan pentingnya kemampuan pemerintah untuk melaksanakan dan melaksanakan proyek-proyek infrastruktur, terutama dalam konteks kemitraan publik-swasta. Beliaumenyoroti perlunya pemerintah untuk menjelaskan kebijakannya kepada publik secara efektif, menggunakan contoh proyek pasokan air. Ruddy menyarankan agar pemerintah daerah harus terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan harus proaktif dalam mempersiapkan transisi energi. Beliaujuga menekankan perlunya pemerintah untuk mengkomunikasikan dampak transisi ini pada populasi lokal.

Sesi Tanya Jawab

Pada sesi diskusi terdapat dua penanya, pertama dari Peneliti Bidang Hukum, TII, Christina Clarissa yang secara garis besar menanyakan tentang bagaiman menyeimbangkan pembangunan dan perlindungan lingkungan? Putu lebih lanjut menguraikan konsep kebebasan ekonomi, menekankan bahwa itu harus didasarkan pada pilihan pribadi dan aturan hukum, daripada pembuatan uang sewenang-wenang. Selain itu, Putu menekankan perlunya pemerintah pusat untuk mendengarkan pemerintah daerah dan mempertimbangkan perspektif mereka tentang potensi dampak ekonomi dan persyaratan pemantauan.

Ikut menjawab pertanyaan tersebut, Ninasapti menyoroti pentingnya pendekatan bottom-up, yang melibatkan komunitas lokal dan menangani kepentingan mereka. Beliaumenimbulkan kekhawatiran tentang kurangnya otoritas bagi pemerintah daerah dan potensi korupsi dalam proses pengambilan keputusan. Diperlukan tata kelola inklusif dan transparan yang menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Pertanyaan berikutnya dari Direktur Eksekutif TII, Adinda Tenriangke Muchtar yang secara umum menanyakan terkait Bagaimana menyeimbangkan kebebasan ekonomi dan keberlanjutan? Ninasapti menjawab dengan membahas pentingnya menyeimbangkan kebebasan ekonomi dan keberlanjutan, menekankan perlunya mempertimbangkan kesejahteraan mayoritas orang, bukan hanya sepuluh persen terkaya. Beliau menyoroti perlunya aturan institusional untuk bersikap adil dan tidak bias terhadap beberapa orang terpilih. Beliau juga menyebutkan perlunya memantau dan mengantisipasi dampak keputusan ekonomi terhadap lingkungan, dengan menggunakan contoh ekspor pasir Riau ke Singapura.

Ruddy setuju dengan poin Ninasapti dan menyarankan bahwa alih-alih berfokus pada seluruh sistem hukum, mereka harus memilih kasus tertentu untuk ditangani. Beliau juga menekankan pentingnya konsultasi publik dalam proses pengambilan keputusan, menggunakan contoh proyek kemitraan publik-swasta di Jawa Timur. Ruddy membahas konsep kebebasan ekonomi, menekankan pentingnya memindahkan subsidi terhadap subsidi bertarget langsung yang dapat mendorong visibilitas dan pemberdayaan lokal. Beliau menyarankan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan jumlah subsidi sementara memiliki dampak signifikan pada kebebasan ekonomi.